

Dampak Kebijakan Penyediaan Infrastruktur Dasar Terhadap

This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this **Dampak Kebijakan Penyediaan Infrastruktur Dasar Terhadap** by online. You might not require more time to spend to go to the ebook instigation as competently as search for them. In some cases, you likewise complete not discover the statement Dampak Kebijakan Penyediaan Infrastruktur Dasar Terhadap that you are looking for. It will no question squander the time.

However below, taking into consideration you visit this web page, it will be thus agreed easy to acquire as capably as download lead Dampak Kebijakan Penyediaan Infrastruktur Dasar Terhadap

It will not admit many period as we run by before. You can do it though enactment something else at house and even in your workplace. thus easy! So, are you question? Just exercise just what we have the funds for below as well as review **Dampak Kebijakan Penyediaan Infrastruktur Dasar Terhadap** what you taking into consideration to read!

**Nota keuangan dan
anggaran pendapatan dan
belanja negara - Indonesia
2008**
Report on budget,
appropriations, and

expenditures of the Republic of
Indonesia.

*EKOLOGI PANGAN DAN GIZI
MASYARAKAT* - Siti Nur Aisyah
Jamil

Pidato kenegaraan Presiden RI di depan DPR RI, 16 Agustus 2006 - Indonesia. President (2004-2014 : Yudhoyono) 2006

PANDEMI CORONA: VIRUS DEGLOBALISASI Masa Depan Perekonomian Global dan Nasional - Didin S. Damanhuri 2020-07-12

Buku ini mencoba untuk merekam sejumlah tulisan yang dipublikasikan di media massa baik cetak maupun online serta dialog sosial media oleh sejumlah pakar dan akademi di berbagai bidang. Tidak saja melihat pandemi COVID-19 dari perspektif ekonomi baik untuk mengatasi sebab maupun akibat yang ditimbulkan, tetapi juga melihat pandemik COVID-19 dari spektrum yang lebih luas mencakup aspek sosial, agama, teknologi, filsafat hingga kesiapan infrastruktur kesehatan berupa industri farmasi. Meliputi 43 artikel terbagi dalam tiga bab utama dan satu bab khusus dialog Facebook Prof Didin S Damanhuri yang dimuat di media massa dan sosial media

dalam kurun waktu Maret hingga April 2020.

Pemikiran Guru Besar IPB: Tantangan Generasi Muda dalam Pertanian, Pangan, dan Energi - Dewan Guru Besar IPB 2016-01-01

Intelijen Ekonomi - Rubijanto Siswosoemarto 2013-08-26

""Pada masa lalu, pola hubungan antarnegara dunia yang bersifat bipolar didominasi oleh isu-isu geopolitik dan geostrategi, seperti pengembangan kekuatan militer serta hegemoni kekuasaan antara satu negara dan negara lainnya. Namun saat ini globalisasi mengubah sifat pola hubungan itu menjadi ekonomis, dalam arti keamanan nasional suatu negara cenderung dilihat dari aspek kekuatannya, bukan dari kapabilitas militer dan persenjataannya. Kompleksitas globalisasi tersebut menciptakan tantangan yang khas bagi dunia intelijen dan sudah saatnya pengamat intelijen di Indonesia merespons hal itu

dengan memusatkan perhatiannya pada perkembangan ekonomi nasional dan global. Masalah keamanan yang lebih bersifat ekonomis—seperti energi, ketahanan pangan, finansial, terorisme yang sangat asimetrik, perompakan, pembajakan, penyelundupan manusia, pencucian uang, dan bentuk-bentuk kejahatan transnasional lainnya—begitu kompleks sehingga memerlukan pendekatan informasi yang lengkap, menyeluruh, dan sempurna agar pemerintah dapat mengambil posisi yang tepat. Dalam hal ini, dukungan informasi intelijen ekonomi sebagai upaya *early warning* dan *early detection* yang tajam dan akurat sangat dibutuhkan agar langkah kebijakan pemerintah untuk meresponsnya tidak merugikan negara. Buku ini merupakan referensi yang amat bermanfaat bagi komunitas intelijen di segala bidang, baik dalam lingkup pemerintah maupun swasta, dalam memperluas wawasan agar

mereka tetap mampu menjaga kepentingan nasional dan menjawab tuntutan perkembangan zaman. Di sisi lain, buku ini memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang visi, misi, posisi, dan fungsi intelijen demi kepentingan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara yang sering kali tidak mudah dilaksanakan mengingat berbagai risiko yang harus dihadapi."""

Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-... Proklamasi kemerdekaan RI di depan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia - Indonesia. President 2012

MADIUN KOTA PENDEKAR PRESPEKTIF KEBIJAKAN WISATA BUDAYA PENCAK SILAT - Dr. Sigit Supto Nugroho, S.H., M.Hum, 2021-02-17

Buku ini merupakan hasil riset penulis sebagai upaya untuk memberikan kontribusi perguruan tinggi dalam pengembangan pembangunan daerah khususnya di Kota

Madiun dan dapat dijadikan rujukan daerah-daerah lainnya dalam mengembangkan industri kreatif pariwisata. Untuk itu penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada Walikota Madiun dan jajarannya terutama Dinas terkait yang telah memberikan kemudahan dalam mengakses data dalam penelitian, Rektor Universitas Merdeka Madiun yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian dan pengembangan riset, Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas yang telah memberikan dorongan semangat untuk terus berkarya dalam penelitian, Segenap pimpinan perguruan silat di wilayah Kota Madiun yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam riset dan penulisan buku ini.

Penataan Ruang - Santun R.P.
Sitorus 2019-09-01

Buku ini terdiri dari lima bagian utama. Pertama mengenai Sejarah dan

perkembangan penataan ruang di Indonesia. Kedua, mengenai pengertian, ruang lingkup, proses, komponen-komponen penataan ruang wilayah dan perencanaan tata ruang partisipatif. Ketiga, mengenai teori struktur ruang, teori lokasi, teori land rent, fasilitas sosial dan pusat-pusat pelayanan. Keempat, mengenai daya dukung lingkungan, infrastruktur wilayah, sistem permukiman perdesaan dan perkotaan. Kelima, mengenai konsep agropolitan, prosedur dan sistem peraturan perundangan penataan ruang wilayah di Indonesia.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Local Community Economic Empowerment And Corporate Social Responsibility) (Teori, Konsep, Dan Implementasi Kebijakan Publik) -

Alexander Phuk Tjilen
2019-07-01

Berbagai upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat

melalui perbedaan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, tetapi belum mendapatkan hasil yang diharapkan, untuk itu perlu peran serta partisipasi semua pihak baik aparat pemerintah, masyarakat secara umumnya, perempuan maupun swasta untuk terlibat pemberdayaan yang bersifat ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Monografi ini berisikan benang merah implementasi kebijakan publik tentang pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan yang terdiri dari enam buah hasil penelitian yang untuk menjawab bagaimana suatu implementasi kebijakan yang sebaiknya dilaksanakan.

Privatisasi di Indonesia -

Indra Bastian 2002

Privatization of government corporations in Indonesia.

Making Globalization Work -

Strategi nasional

penanggulangan kemiskinan -
2005

Infrastructure's Contribution to Aggregate Output - David Canning 1999

"Of the major kinds of physical infrastructure, electricity generating capacity has roughly the same marginal productivity as physical capital as a whole. So have roads-plus-rail, globally and in lower-income countries. Telephones, however, and transport routes in higher-income countries, have higher marginal productivity than other kinds of capital"--Cover.

JSP - 2004

Isu Kesehatan Masyarakat dalam SDG's - Yunita Amraeni
2021-08-19

Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia meletakkan kesehatan adalah salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan. Kondisi umum kesehatan Indonesia dipengaruhi oleh faktor

lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Masalah kesehatan masyarakat sampai saat ini masih menjadi perhatian bagi pemerintah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan masih rendah. Tingkat kesehatan masyarakat yang tidak merata dan sangat rendah khususnya terjadi pada masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh. Perilaku masyarakat yang masih tidak higienis ditambah lagi dengan tidak adanya sarana dan prasarana lingkungan yang mendukung berdampak pada kesehatan masyarakat yang tinggal pada pemukiman kumuh tersebut. Banyak masalah kesehatan masyarakat yang mungkin akan timbul akibat perilaku masyarakat dan kondisi lingkungan yang tidak memperhatikan kesehatan. Buku ini mengkaji berbagai permasalahan kesehatan yang menjadi target utama dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's) diantaranya terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional, Permasalahan KIA, Stunting

sampai pada Fakta kasus Pandemi Covid-19. Setelah adanya pemaparan terkait data dan fakta kasus, buku ini juga mengkaji berbagai program intervensi yang sudah dilakukan dan bagaimana kendalanya sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya.

Pembangunan Pertanian - Bernatal Saragih 2021-05-01
Buku berjudul Pembangunan Pertanian ini merupakan kumpulan artikel hasil pemikiran atau opini dari para dosen Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman. Hasil di dalam buku ini, diharapkan dapat menjadi inspirasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya pada bidang pertanian kompleks mulai dari Agribisnis, Agroekoteknologi, Peternakan, dan Ilmu Pangan dan Gizi. Di dalam buku ini, terdapat 20 judul artikel yang berasal dari akademisi dosen di Faperta Universitas Mulawarman. Artikel-artikel tersebut dibagi menjadi 4 bagian/kelompok, yaitu

Kelompok I: Agroekoteknologi,
Kelompok II: Peternakan,
Kelompok III: Agribisnis, dan
Kelompok IV: Pangan dan Gizi.
Pembangunan Pertanian ini
diterbitkan oleh Penerbit
Deepublish dan tersedia juga
dalam versi cetak.

**Visi baru Kalimantan Timur,
2025** - Sofyan Hasdam (A.)
2007

Vision on development of
Kalimantan Timur Province by
the year 2025.

**Indonesia di bawah Orde
Baru** - Frans Hüsken 1997

**Kebijakan Media Baru Di
Indonesia** - Hermin Indah
Wahyuni 2018-05-18

Media baru dengan
kemampuan konvergensi yang
tinggi telah melahirkan dilema
legislasi yang spesifik.
Perkembangan teknologi inilah
yang kemudian 'memaksa' para
pengambil kebijakan di
berbagai belahan dunia untuk
mengambil sikap mengenai hal
ini. Karakter media baru harus
dihadapi dengan kebijakan
yang komprehensif. Hanya
dengan itulah situasi "critical
iuncture' dapat dihindarkan.

Sebuah titik kritis dimana
keputusan penting harus
segera diambil agar
masyarakat tidak dikorbankan.
Dengan kondisi Indonesia yang
unik dari segi problem dan
dinamika masyarakatnya, maka
penu sebuah posisi yang jelas
bagi pemerintah untuk dapat
mengoptimalkan potensi
kemajuan teknologi dan
sekaligus melakukan
perlindungan pada masyarakat
yang kurang beruntung.
Pekerjaan rumah pemerintah
tampaknya cukup kompleks.
Pemerintah harus menjamin
dan menyiapkan struktur pasar
konduif dan menjamin
keadilan informasi dan
komunikasi bagi seluruh
lapisan masyarakat.
Pemerintah sekaligus perlu
meyakinkan masyarakat bahwa
seluruh aturan main telah
disiapkan dengan baik. Dengan
pemenuhan prasyarat tersebut
Indonesia akan lebih optimis
memasuki fase konvergensi
media dan komunikasi dengan
segala implikasinya. Buku ini
ingin memotret peta kebijakan
media baru Indonesia oleh
sang regulator pemerintah, di

tiga domain utama: internet, media lama yang terbarukan dan telekomunikasi. Tiga pertanyaan besarnya: Apa saja yang sudah dicapai?, Harapan apa yang masih mungkin direalisasikan?, serta bagaimana dinamika problem yang harus diselesaikan. Proses menuju kebijakan media baru yang optimal harus terus diupayakan. Tak ada jalan lain kita perlu terus berproses berangkat dari riil problem yang dihadapi dan mengembangkan struktur kebijakan yang adaptif untuk menyelesaikan problem tersebut.

PELUANG INVESTASI INFRASTRUKTUR BIDANG PEKERJAAN UMUM -

Entatarina Simanjuntak, ST, M.Plan

Averting an Infrastructure Crisis - 2004

Kontrak Pemerintah. Konsep, Ragam, Perkembangan Regulasi dan Kajian Putusan -
Richo Andi Wibowo (ed)
2021-08-01

Buku ini mengulas tiga hal

besar: (i) mengelaborasi konsep dan ragam kontrak pemerintah dari perspektif hukum publik dan hukum privat; (ii) menguraikan perkembangan regulasi pada beberapa jenis kontrak pemerintah; dan (iii) mengkaji aneka putusan yang terkait dengan kontrak pemerintah. Ragam kontrak pemerintah yang dibahas adalah pengadaan barang jasa; pengelolaan barang milik negara, seperti kerja sama pemanfaatan, build transfer operate, build operate transfer; kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk penyediaan infrastruktur, hingga penugasan pemerintah kepada BUMN. Dibahas pula aneka kasus hukum yang telah diputus baik oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), putusan peradilan umum (Perdata), hingga putusan Tata Usaha Negara yang berkelindan dengan pidana korupsi. Buku ini ditulis oleh akademisi-peneliti, ASN dan praktisi hukum yang menggeluti isu kontrak pemerintah. Sehingga buku ini

mengkombinasikan “cita rasa” ilmiah sekaligus praktikal. Maka, buku ini cocok untuk aneka kalangan, baik praktisi maupun mahasiswa hukum, bahkan dari disiplin non-hukum, seperti teknik sipil, ilmu pemerintahan, dan lainnya. Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup Kencana

Collaborative Governance Dalam Penyediaan

Infrastruktur - Kurniadi
2020-06-01

Partisipasi swasta dalam penyelenggaraan infrastruktur publik dikenal sebagai kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Proyek-proyek yang menggunakan skema KPBU biasanya menggunakan metode pengadaan yang menggabungkan desain, pembangunan, keuangan, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur secara holistik dan inovatif. Ada dua jenis infrastruktur yang diperoleh melalui KPBU, yakni infrastruktur sosial (sekolah, rumah sakit, penjara, dan gedung pengadilan) dan

infrastruktur ekonomi (bandara, transportasi jalan kereta api, dan pelabuhan laut), yang terakhir menggunakan biaya tol untuk pemulihan biaya modal. Skema KPBU dinilai menarik bagi pemerintah karena manfaat ekonomi yang telah disediakan sebelumnya, alokasi dan transfer risiko kepada investor badan usaha, dan pembayaran biaya pengadaan infrastruktur yang tidak dimuka. Inilah sebabnya mengapa KPBU menjadi opsi pengadaan yang lebih disukai daripada opsi alternatif lainnya. Skema KPBU sangat penting untuk dipertimbangkan dalam pengadaan infrastruktur sektor publik, juga KPBU dipandang efisien dan efektif dalam menjalankan proyek. Tatakelola kolaboratif diambil dari beragam praktik dan penelitian dalam administrasi publik. Tulisan ini mensintesis dan memperluas seperangkat kerangka kerja konseptual, temuan penelitian, dan pengetahuan berbasis praktik ke dalam kerangka kerja integratif untuk tatakelola

kolaboratif. Kerangka kerja ini menetapkan seperangkat dimensi yang mencakup konteks sistem yang lebih besar, rezim tatakelola kolaboratif, dan dinamika dan tindakan kolaboratif internal yang dapat menghasilkan dampak dan adaptasi di seluruh sistem. Kerangka kerja ini menyediakan peta konseptual yang luas untuk menempatkan dan mengeksplorasi komponen-komponen sistem tatakelola lintas batas yang berkisar dari kebijakan atau kerjasama antarpemerintah berdasarkan program hingga kolaborasi regional berbasis tempat dengan pemangku kepentingan nonpemerintah hingga kemitraan publik-swasta. Kerangka kerja ini mengintegrasikan pengetahuan tentang insentif individu dan hambatan untuk tindakan pengumpulan, pembelajaran sosial kolaboratif dan proses penyelesaian konflik, dan pengaturan kelembagaan untuk kolaborasi lintas batas. Ini disajikan sebagai kerangka kerja umum yang dapat

diterapkan untuk analisis pada skala yang berbeda, di arena kebijakan yang berbeda, dan berbagai tingkat kompleksitas. Collaborative Governance Dalam Penyediaan Infrastruktur ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak*

Innovative Infrastructure Financing through Value Capture in Indonesia - Asian Development Bank 2021-05-01
Indonesia needs significant additional infrastructure investment to sustain its economic growth. However, the COVID-19 pandemic has further limited the fiscal space of the government. This report proposes a new method to increase infrastructure investment based on the concept of value capture. The report studies how Indonesia's existing policies and regulations can be used to build a value capture framework that ensures the maximization of the social, economic, and environmental value of infrastructure investments. The framework

focuses on strategies to deliver infrastructure projects that create greater value and, at the same time, generate funding for up-front investment.

Analisis kebijaksanaan pembangunan pertanian andalan berwawasan agribisnis - 2002

Development of agricultural processing industries in Indonesia.

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Luwu tahun 2021-2036 - Drs. Muhammad Arifin, M.Pd., CHE
Sinkronisasi sektor-sektor pembangunan merupakan modal dasar bagi tercapainya pembangunan pariwisata yang terpadu baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Pembangunan pariwisata terpadu (integrated tourism development) terkait erat dengan berbagai sektor dan aspek yang tidak terlepas dari pola dan sistem perencanaan pembangunan daerah. Dalam upaya memaksimalkan keterkaitan antar sektor pembangunan tersebut, Kebijakan Pembangunan Kepariwisata

merupakan salah satu jawaban yang dapat mengakomodasi konstelasi tersebut, serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan sesuai dengan perubahan kondisi saat ini. Kebijakan Pembangunan Kepariwisata diperlukan untuk menghindari pembangunan yang bersifat sektoral, tumpang tindih atau terbengkalai karena saling berharap; menghindari pembangunan pariwisata yang tidak terencana (bongkar pasang); dan meminimalisasi dampak negatif pariwisata yang mungkin timbul dan memaksimalkan dampak positif pariwisata terhadap pembangunan nasional, regional dan daerah. Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Luwu dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pariwisata sekaligus memberikan arah pengembangan yang jelas di dalam memposisikan kepariwisataan Kabupaten Luwu pada tingkat provinsi maupun nasional dan yang

tidak kalah pentingnya agar dapat bersinergi secara positif, dan menghindarkan benturan antar daerah. Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Luwu juga dapat memberikan tatanan yang jelas dalam pelaksanaan pengembangan kepariwisataan daerah, termasuk dalam mekanisme kerjasama antar berbagai pihak yang terkait : siapa berbuat apa, baik untuk instansi tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten, dan kaitan antar sektor dalam kabupaten. Pengembangan pariwisata Kabupaten Luwu sebagai destinasi unggulan Provinsi Sulawesi Selatan tidak terlepas dari kepopuleran potensi alam, sejarah dan budaya yang cukup dikenal sehingga dalam pengembangannya membutuhkan adanya suatu perhatian khusus dari seluruh stakeholders untuk saling berinteraksi dan bersinergi satu sama lainnya.

Globalisasi dan NGO. - 1997
Non-governmental organizations, Indonesia; results of discussions.

Bersama membangun negeri - Rosidi 2009

Documentation on Susilo Bambang Yudhoyono's activities as Indonesian President, 2004-2009.

Zakat dan pembangunan, era baru zakat menuju

kesejahteraan ummat - 2008

Development report on the role of zakat in the economic conditions of Indonesia for the year 2009.

Kebijakan Pembangunan Perkotaan - Mohammad Nuh 2017-11-01

Buku ini memaparkan relevansi kajian kebijakan pembangunan perkotaan dalam disiplin Ilmu Administrasi Publik, khususnya sebagai bagian dari kajian analisis kebijakan secara substantif, yaitu keseluruhan proses pembangunan perkotaan. Pembahasan dimulai dengan membentangkan isu strategis pembangunan perkotaan dan ketersediaan infrastruktur perkotaan di dalamnya mencakup permasalahan demografi, hunian, urbanisasi, transportasi, ketersediaan lapangan pekerjaan,

kemiskinan, dan permasalahan pelayanan publik lainnya.

Perencanaan Pembangunan & Pembuatan Kebijakan

Daerah: Dari Teori Ke

Praktik - Nalil Khairiah Dr.

Siti Hajar, Dedi Amrizal, Jehan

Ridho Izharisyah, Ananda

Mahardika 2022-02-26

Buku prosiding ini merupakan

karya ilmiah yang dihasilkan

melalui program Praktik

Penelitian Lapangan (PPL)

Program Studi Ilmu

Administrasi Publik (IAP)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas

Muhammadiyah Sumatera

Utara. Karya ilmiah yang

terdapat dalam buku prosiding

ini merupakan kolaborasi

antara dosen dan mahasiswa

yang ditujukan untuk

memenuhi tri dharma

perguruan tinggi pada

komponen penelitian dan

pengabdian kepada

masyarakat. Materi yang

termuat dalam buku prosiding

ini meliputi tema perencanaan

pembangunan dan kebijakan

publik. Tema tersebut dipilih

untuk menunjukkan

kompetensi dosen dan lulusan

program studi yang menguasai bidang kajian administrasi publik secara profesional.

Ekonomi Kelembagaan: Studi Kasus pada Transportasi

Pedesaan dan Dampak

Covid-19 - Wihana Kirana Jaya
2021-09-14

“Sebagai Plt. Kepala BPSDM,

saya mengapresiasi buku ini

karena mengisi kelangkaan

literatur yang membahas teori

dan praktik di dunia

transportasi. Buku ini sangat

dianjurkan bagi mahasiswa di

lingkungan BPSDM untuk

dibaca maupun dijadikan

referensi atau rujukan. Salah

satu permasalahan di

lingkungan BPSDM sangat

teknis, sehingga buku ini

membuka wawasan baru untuk

referensi pembuat kebijakan,

terutama bagi para lulusan

sekolah teknik ketika menjabat

di Kementerian Perhubungan.”

- Ir. Zulfikri, M.Sc., DEA (Plt.

BPSDM Kemenhub) “Buku ini

tidak hanya menyajikan teori,

namun juga solusi dari

pendekatan teori Ekonomi

Kelembagaan Baru pada kasus

rule of the game di sektor

pelabuhan dan transportasi

kelautan. Seperti yang dijelaskan di dalamnya, dengan kolaborasi institusi formal dan informal yang baik, dapat menawarkan alternatif solusi terhadap sejumlah permasalahan, seperti konflik antarpemangku kepentingan antara regulator, operator, industri, dan pemangku kepentingan lainnya yang banyak terjadi di sektor transportasi, terutama logistik." - Carmelita (Ketua INSA) "Saya terkesan dengan buku ini karena menyoroti pemikiran ekonomi kelembagaan, terutama problem solving dalam mengatasi krisis industri aviasi, baik krisis ekonomi, pandemi, dan kolusi atau kartel seperti dalam bab "Indonesia Incorporated Industri Penerbangan". - Faik Fahmi (Direktur Utama PT. Angkasa Pura I) "Ketika saya membaca buku ini, saya teringat ketika saya mengambil S3 tentang Institutional Economics dengan pendampingan oleh Prof. Wihana. Ilmu institusi tidak hanya penting dalam dunia transportasi namun juga dalam

dunia bisnis. Oleh karena itulah, saya sangat mengapresiasi dan dengan senang hati mendukung penerbitan buku ini. " - Dato Sri Tahir (Tahir Foundation)
Dunia EKUIN dan PERBANKAN - 2008

Tanah, Rakyat dan Penanaman Modal Pasca Undang-Undang Cipta Kerja (2) - Maria Fransiska Christiani Nawang
2022-11-24

Dalam Buku Jilid 2 ini ada 16 tulisan yang membahas dan mengupas tanah, rakyat dan penanaman modal. Bahwa selama manusia masih hidup dan telah matipun akan berkaitan dengan tanah atau hal lainnya yang selalu memerlukan tanah seperti penanaman modal, sehingga dalam hal ini apakah rakyat jadi subjek atau objek ? Ketiga hal - tanah, rakyat dan penanaman modal - tersebut dibahas dalam buku ini. Buku ini diawali dengan tulisan tentang kebijakan reforma agraria di indonesia dari Maria Fransiska Christiani Nawang, S,H. Pada dasarnya perjalanan

reforma agraria di Indonesia bukan hal yang mudah. Hal ini dilihat dari perjalanan reforma agraria sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Meskipun pada masa orde baru reforma agraria sempat terhenti, namun adanya dorongan rakyat dan kelompok lainnya membuat kebijakan reforma agraria kembali dijalankan. Peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk seperti UUD 1945, TAP MPR IX/2001, UU Pokok Agraria, UU Cipta Kerja, PP Bank Tanah, Perpres 86/2018 adalah perangkat aturan yang menjadi petunjuk perjalanan reforma agraria yang tentunya diharapkan tetap memberikan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Proyeksi Ekonomi Indonesia 2018, Stabilitas Tanpa Akselerasi - Enny Sri Hartati
2020-12-10

Buku Proyeksi Ekonomi Indonesia 2018: Stabilitas Tanpa Akselerasi merupakan bagian dari upaya INDEF untuk menggugah pemerintah

agar segera memaksimalkan momentum stabilitas makroekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Buku ini juga ditujukan untuk memastikan bahwa strategi kebijakan ekonomi pemerintah telah berjalan sesuai arah yang benar.

Transformasi sosial - 2007

Social and economic conditions in Borneo and Kalimantan.

Unika Dalam Wacana Publik 2017-2018 - Benny Danang Setianto and Gustav Anandhita
Diterbitkan dalam rangka Dies Natalis Unika Soegijapranata ke 36

Ecocide : Memutus

Impunitas Korporasi - Walhi

Riau - Ridha Saleh 2019-05-28

Greta Thunberg, seorang pelajar yang menginisiasi mogok sekolah dan kemudian menginspirasi pelajar di berbagai belahan dunia mendesak semua pihak untuk serius menangani situasi darurat iklim (climate emergency) dan krisis ekologis (ecological crisis). Apa yang disampaikan Greta adalah

fakta krisis global yang mengancam seluruh makhluk bumi dan generasi yang akan datang di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Penghancuran lingkungan hidup yang terjadi selama puluhan tahun di Indonesia telah berdampak luas. Bencana ekologis yang terjadi di Indonesia dan peningkatannya dari tahun ke tahun menjadi fakta tak terbantahkan. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2018) menunjukkan dari 2.426 kejadian bencana di Indonesia, 96,6% merupakan bencana hidrometeorologi. Masih meluasnya kerusakan daerah aliran sungai, lahan kritis laju kerusakan hutan, kerusakan lingkungan hidup menjadi penyebab tingginya bencana iklim. Bahkan sejak tahun lalu, BNPB telah menyatakan bahwa semakin meningkatnya bencana di Indonesia telah menunjukkan situasi darurat ekologis. Akibatnya, keselamatan hidup rakyat terus terancam, tanpa jaminan perlindungan dari negara. Konstitusi Negara

Republik Indonesia UUD 1945 pada Amandemen ke-2, Pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal 9 ayat 3, menyebutkan bahwa Masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Demikian juga dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup No. 32/2009. Dalam instrumen HAM, hak atas lingkungan hidup merupakan hak asasi manusia yang masuk dalam rumpun hak ekonomi, sosial dan budaya, meskipun tentu saja tidak bisa dipisahkan dari hak sipil dan politik, serta sebagai hak individual dan kolektif. Benteng hak asasi manusia yang dimandatkan kepada negara, mengalami kontradiksi dalam konteks politik hukum. Di satu sisi, menunjukkan menguatnya peran negara dalam upaya perlindungan dan memastikan tersedianya lingkungan hidup yang baik

dan sehat bagi warga negara, yang diperkuat dalam Amandemen kedua UUD 1945 pasal 28H yang memasukkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia. Namun di sisi lain, tidak ada perubahan paradigma pembangunan negara dalam melihat lingkungan hidup sebagai komoditi dan objek eksploitasi, manajemen industri dan investasi. Kontradiksi terjadi ketika fungsi dan peran negara justru bertentangan dengan produk kebijakan lain. Misalnya, kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang justru membuka ruang ancaman yang besar akan adanya pelanggaran HAM oleh pelaku bisnis terhadap warga negara. Perampasan dan penghancuran hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupannya justru bersumber dari kebijakan negara. Sayangnya, instrumen HAM yang ada pada saat ini masih berfokus pada negara sebagai aktornya. Meskipun sejak 2011, telah ada UN guiding principles bagi bisnis

dalam bidang hak asasi manusia. Padahal pada saat ini ketika bicara tentang kerusakan lingkungan hidup, non state actor terutama korporasi ini menjadi aktor utama bahkan dalam proses atas penghancuran ekosistem dan penghancuran hak-hak manusia. Kecenderungannya dalam kurun waktu lebih dari 3 dekade, negara justru menjadi alat dari non state actor di dalam melakukan perusakan lingkungan hidup dan ruang hidup rakyat. WALHI juga melihat ulang instrumen-instrumen hak asasi manusia yang tersedia sekarang. Hasilnya, masih lemahnya instrumen HAM yang mampu menjangkau level dan scope kerusakan dan dampak pada masyarakat maupun ekosistem secara lebih utuh. Karena perspektif yang selama ini dominan digunakan lebih bercorak 'antrophosentris'. Padahal membicarakan persoalan ekosistem tak bisa dilepaskan hubungan kompleks manusia dan unsur-unsur non manusia yang ada di dalamnya. Maka, pada saat ekosistem

rusak, bukan semata fisiknya yang rusak, tetapi juga relasinya dengan manusia dan komponen-komponen ekosistem akan rusak dan mengalami penghancuran. Karenanya, kejahatan lingkungan hidup tidak bisa disebut sebagai kejahatan biasa, melainkan kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Pada tahun 2005, WALHI mengembangkan sebuah diskursus kejahatan ecocide. Ketika mendengar ecocide, sebagian besar orang mungkin akan teringat dengan genocide, yakni setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama.² Kejahatan genocide sudah masuk dalam instrument hukum nasional dalam UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Buku yang berjudul Ecocide; Politik Kejahatan Lingkungan hidup dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diterbitkan oleh WALHI mencoba untuk

mengangkat diskursus dan memberikan sebuah gambaran serta kecenderungan sebuah sistem eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan secara terus menerus hingga mengarah pada pemusnahan lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan manusia, yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Diskursus ini mengalami kemandekan ketika diujicoba terhadap kasus kejahatan lingkungan hidup yang terjadi di Sidoarjo, yakni bencana lumpur Lapindo. Selain itu, catatan kritis lainnya adalah sebagian besar waktu dari gerakan lingkungan hidup lebih banyak dihabiskan untuk menangani kasus demi kasus. Atas dasar itulah buku Ecocide ini dihadirkan, dengan tujuan utama mendorong wacana kejahatan lingkungan hidup sebagai kejahatan ecocide dan upaya mendorong adanya norma hukum untuk memastikan terputusnya rantai impunitas korporasi. Sehingga bukan hanya terjebak dalam penanganan kasus per kasus di hilir tapi juga mengungkap

akar mata rantai masalah kasus di level hulunya. Dalam sebuah refleksi, WALHI memandang bahwa penanganan kasus perkasus tanpa mampu memutus rantai impunitas terhadap kejahatan lingkungan hidup dan kemanusiaan yang dilakukan oleh korporasi, tidak akan banyak mengubah situasi. Atas dasar kesadaran itulah WALHI mencoba untuk memunculkan kembali diskursus ecocide yang telah diadvokasi oleh WALHI dalam kurun waktu yang panjang dan telah diuji dengan instrumen hukum lingkungan melalui pengadilan. Penghancuran lingkungan hidup saat ini, tidak bisa lagi diselesaikan hanya dengan mengandalkan cara-cara penegakan hukum lingkungan biasa. Dalam proses ini, WALHI melakukan putaran diskusi terfokus yang melibatkan ahli atau orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hak asasi manusia, hukum lingkungan hidup dan organisasi masyarakat sipil yang bekerja di bidang hak

asasi manusia. Putaran diskusi terfokus ini untuk mendiskusikan lebih jauh pandangan, penajaman dan masukan terhadap draft konsep ecocide dari berbagai perspektif, baik akademis maupun pengalaman praksis dari advokasi yang telah dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil antara lain ELSAM dan KontraS. Putaran diskusi terfokus juga mendiskusikan instrumen-instrumen yang dapat digunakan untuk memperkuat analisa kasus-kasus ecocide. Ada 3 kasus yang dipilih dalam putaran diskusi tersebut, yakni (1) kasus bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo Jawa Timur, (2) kebakaran hutan dan gambut di Kalimantan Tengah, dan (3) kasus pembangunan DAM Koto Panjang di Riau. Ketiga kasus tersebut dinilai memenuhi unsur-unsur sebagai kejahatan ecocide. Untuk penguatan data lapang, dilakukan riset lapang oleh WALHI Daerah, dengan proses awal membuat case matrix guna melihat unsur dan tindakan atau bentuk kejahatan

ecocide. Akhirnya, di tengah darurat kejahatan korporasi dengan sejumlah peristiwa yang terjadi belakangan ini, buku "Ecocide; Memutus Impunitas Korporasi" ini dihadirkan. Harapannya, buku ini dapat semakin memperkuat desakan agar negara tetap dan harus mengambil peran aktif untuk menuntut tanggung jawab atas kejahatan lingkungan hidup dan kemanusiaan yang dilakukan aktor di luar negara (non state actor). Hal ini juga untuk menegaskan bahwa negara memiliki keharusan tanggung jawab negara untuk menghormati (to respect), memenuhi (to fulfill), dan melindungi (to protect) hak asasi manusia, baik generasi

hari ini maupun generasi mendatang. Dari konsep ecocide yang diangkat dan diwacanakan sebelumnya, WALHI berharap pada akhirnya akan bermuara pada; Pertama, lahirnya norma hukum dan kebijakan yang bisa memberikan proteksi terhadap keberlanjutan ekosistem dan kehidupan di bumi ini. Kedua, adanya kebijakan yang menuntut tanggung gugat dari non state actor dalam hal ini adalah korporasi. Rights for Peoples, Rules for Corporations!!
Ensiklopedi ekonomi dan perbankan syariah - Habib Nazir 2004
Indonesian encyclopedia of Islamic economics and banking.